



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Pos Kota |

Komisi D Desak PT Jakpro Segera Ungkap Pembangunan ITF Sunter

JAKARTA (Poskota) - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk segera mengungkap jadwal atau timeline pembangunan pengelolaan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

Diketahui, DPRD DKI Jakarta telah mengalokasikan duit sekitar Rp1,2 triliun untuk pembangunan ITF Sunter pada tahun 2023 mendatang. "Kalau timeline, kami bisa tantang Dirut-nya (Iwan Takwin), bisa nggak selesai 12 bulan," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif, Selasa (20/12).

Menurut Syarif, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ITF juga sangat penting, sehingga menjadi atensi pemerintah daerah (Pemda). Hal ini berkaca pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) T Bantargebang, milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah hampir penuh menampung sampah warga Ibu Kota.

"Ya kita desak supaya ketahuan kapan dimulainya, jadi ada timeline karena publik harus tahu progres dari ITF Sunter. Bulan ini mengerjakan apa dan selesai apa, karena ini kan uang rakyat jadi harus tahu. Selama ini kita tidak pernah diberitahu timelinenya, apa yang sudah selesai dan apa yang belum selesai," ungkap Syarif.

Lanjut Syarif mengatakan, kinerja perseroan merupakan domain Komisi B, sementara Komisi D lebih kepada teknis pembangunan ITF yang dilakukan Jakpro. Meski proyek ini dikerjakan oleh anak perusahaan Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) bersama konsorsium, namun Jakpro harus tetap mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pembangunan ITF sunter. "Kalau sebelum itu, mungkin kami bisa kasih tantangan tapi dia ini hanya meneruskan Dirut yang lama," ucapnya.

Menurutnya, DPRD DKI Jakarta akhirnya menanggarkan pembangu-

nan ITF Sunter sebesar Rp1,2 triliun karena berbagai alasan. Namun utamanya karena wacana pembangunan ini sudah ada sejak lama, yaitu di era Gubernur Fauzi Bowo pada 2005 lalu. "Sudah diketuk palu (disetujui) kemarin, kalau tidak salah Rp1,2 triliun untuk ITF Sunter, kemudian rencana di Jakarta Barat batal, Jakarta Selatan batal sehingga cuma satu di Sunter. Saya optimis ini bisa dikerjakan," tandas Syarif.

Proses Persiapan

Sementara itu Operasional Manager PT Jakarta Solusi Lestari (JSL) Mahisa Muhammad Reno mengklaim, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan penugasan pembangunan ITF Sunter. Harapannya, progres pembangunan ITF Sunter sudah bisa dimulai pada 2023 mendatang. "Kami terus mengupayakan agar tetap terlaksana, sehingga di tahun 2023 ini bisa mulai pembangunan kembali ITF Sunter," ujarnya.

Menurut Mahisa, progres pembangunan ITF Sunter ini akan dilakukan selama tiga tahun dari 2023-2026. Pada tahun 2019 lalu, peseroan telah melakukan persiapan secara paralel dengan groundbreaking, namun saat itu dilakukan tanpa menggunakan keuangan daerah.

"Pada tahun 2019 kami sudah melakukan pra-development juga di aktivitas studi-studi atau kajian, sehingga input untuk memperoleh perizinan, sehingga sejak 2019 sudah memperoleh perizinan AMDAL (analisis dampak lingkungan) lalu lintas, izin mendirikan bangunan (IMB)," pungkas Mahisa. (Aldi/Ifn)



Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif.

Poskota/Aldi